



RENCANA INDUK / MASTER PLAN

*Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah
di Kawasan Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan
Sebagai Destinasi Wisata*

DAFTAR PENYUSUN RENCANA INDUK (MASTERPLAN)



PENANGGUNG JAWAB

Andi Muhammad Said, M.Hum

PENGARAH

1. Hari Untoro Dradjat, M.A.
2. Sri Rahayu Budiarti, M.M.
3. Soeroso M.P, M.Hum .
4. Dr. Amran Ahmad
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sul-Sel
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pangkep
8. Kepala Taman Nasional Babul, Maros-Pangkep

PIHAK-PIHAK YANG TELAH MEMBERIKAN MASUKAN

1. Pemerintah Kabupaten Maros
2. Pemerintah Kabupaten Pangkep
3. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Maros-Pangkep
4. Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin
5. Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin
6. LSM Pemerhati Budaya & Pariwisata
7. LSM Pemerhati Lingkungan
8. Tokoh Masyarakat
9. Keluarga Mahasiswa Arkeologi FIB Universitas Hasanuddin
10. Ujungpandang Heritage Society

PENYUSUN

1. Dr. Daud Tanudirjo, M.A.
2. Drs. Gatot Ghautama, M.A.
3. Dr. Serrano Sianturi, Phd.
4. Drs. Roby Ardiwijaya, M.BIT.
5. Drs. Marsis Sutopo, M.Si
6. Iwan Sumantri, M.A.
7. Drs. Yunus Arbi, M.A.
8. Drs. Muhammad Ramli
9. Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum.
10. Drs. Mohammad Natsir, M.Pd.
11. Ir. M. Agustono
12. Marly Maknun, ST.

LAY OUT DAN VISUALISASI :

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR





Puji syukur kita panjatkan ke hadirat **Tuhan Yang Maha Esa** karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah dapat disusun dan diterbitkan buku "Rencana Induk (*Masterplan*) Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan" sebagai Destinasi Wisata. Buku ini disusun berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun 2007 oleh tim yang dibentuk khusus. Buku rencana induk ini secara rinci memuat tentang potensi situs, permasalahan, visi dan misi, serta kebijakan, strategi, dan program yang terkait dengan pengelolaan kawasan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan, serta dapat mewakili berbagai kepentingan yang terdapat dalam kawasan ini.

Terwujudnya Rencana Induk ini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan yang baik dari semua pihak, khususnya para pakar yang telah membantu mencurahkan segala kemampuan dan pemikirannya sejak penyusunan konsep, pengumpulan data hingga penyusunan dan penyelesaian naskah Rencana Induk ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Kabupaten Maros
Pemerintah Kabupaten Pangkep
Taman Nasional Bantimurung dan Bulusaraung
Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin
Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin
LSM dan Tokoh Masyarakat

Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan buku "Rencana Induk (*Masterplan*) Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan".

Kami menyadari bahwa *masterplan* ini masih belum sempurna, sehingga masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Namun sebagai langkah awal, *masterplan* ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pengelola Kawasan Gua-gua Prasejarah Maros-Pangkep. Untuk itu, buku *masterplan* ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat, instansi terkait, para pemerhati dan pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lansekap gua-gua prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep.

Kepala
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Andi Muhammad Said, M.Hum

Proses penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan" sebagai Destinasi Wisata, telah dilakukan pada tahun 2007 yang melibatkan banyak pihak, baik kalangan praktisi, akademisi dan juga masyarakat. Pada saat kajian ini berlangsung, kebudayaan masih bergabung di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, *Masterplan* ini diarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata yang berwawasan pelestarian. Hal ini sejalan dengan arahan bapak Hari Untoro Dradjat, Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala pada masa itu, yang menyatakan bahwa pelestarian dan pengembangan situs, kompleks dan kawasan purbakala membutuhkan pola dan strategi perencanaan yang tepat, agar pelestarian tinggalan budaya baik nilai dan tinggalan fisiknya dapat tercapai. Strategi penanganan pelestarian dan pengembangan tersebut akan sangat ditentukan oleh model perencanaannya, termasuk pelibatan instansi terkait dan partisipasi masyarakat sekitar situs/ kawasan purbakala. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa salah satu langkah penting dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan purbakala adalah dengan terlebih dahulu menyusun Rencana Induk (*Masterplan*) yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan sinergis dengan berbagai sektor terkait. Dengan demikian maka setiap perencanaan yang akan diterapkan dapat menjamin aspek Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dengan pola kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bapak Syahrul Yasin Limpo dalam sambutan di edisi pertama buku ini. Dimana salah satu prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan adalah pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata yang bermuara pada dua sasaran pokok, yakni pembangunan kebudayaan sebagai jati diri dan kebanggaan Nasional, serta pembangunan industri pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan pembangunan daerah. Khusus untuk Sulawesi Selatan yang ditetapkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata unggulan, perlu disikapi dengan mereview dan merevitalisasi objek dan tujuan wisata yang ada.



Objek wisata yang sudah dikenal di dunia internasional, khususnya Tana Toraja, merupakan peluang yang harus ditangkap oleh se luruh pemangku kepentingan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di daerah ini. Potensi wisata yang sudah terkenal tersebut, menjadi peluang bagi kita untuk membangun kepariwisataan lain yang belum maksimal pemanfaatannya. Untuk menunjang hal tersebut perlu disusun suatu model perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sektor kebudayaan yang bersifat terpadu dan sinergi dengan berbagai sektor terkait. Dengan demikian maka kegiatan pengembangan pemanfaatan warisan budaya sebagai obyek wisata dapat tumbuh dan berkembang secara bersama dengan sektor lainnya serta berwawasan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan pemanfaatan kebudayaan, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* sebagai obyek wisata sejalan dengan trend pariwisata masa kini yang telah berkembang ke arah wisata minat khusus. Sejalan dengan trend pariwisata tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah penyiapan dan pengemasan berbagai warisan budaya yang ada di wilayah ini agar dapat memiliki daya tarik, sehingga dapat menjadi obyek destinasi wisata yang memiliki ciri kelokalan Sulawesi Selatan. Demikian halnya dengan warisan budaya yang berupa gua-gua prasejarah yang terdapat pada kawasan karst Maros-Pangkep merupakan suatu entitas keterpaduan antara warisan budaya dengan bentang alam yang bercitra lingkungan indah, adalah sebuah potensi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan berbagai jenis kepariwisataan. Dalam rangka pengembangan Kawasan Gua-gua Prasejarah Maros-Pangkep yang merupakan warisan budaya masa prasejarah yang kondisinya rapuh dan sangat terbatas jumlahnya, maka dibutuhkan sebuah Rencana Induk (*Masterplan*) yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan sinergi antara seluruh sektor terkait pusat dan daerah, sehingga memungkinkan tercapainya pengembangan pemanfaatan yang berwawasan pelestarian.

Pengembangan pemanfaatan sumber daya budaya yang berwawasan pelestarian ini memang menjadi sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, dalam hal ini sejalan dengan arahan bapak Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat kajian ini dilakukan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan, memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan diarahkan untuk membangun kesadaran berbangsa dan sekaligus mendukung peningkatan devisa Negara. Oleh karena itu, pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan tersebut perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat dan daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaku pariwisata. Mengingat nilai pentingnya yang terkandung pada setiap warisan budaya yang dapat bermakna sebagai identitas dan jatidiri bangsa, maka diharapkan kepada semua pemangku kepentingan, agar dapat berhati-hati dalam penanganan dan pengelolannya.

Yadi Mulyadi, SS., M.Hum



PENGANTAR PENERBIT

Gagasan pengembangan kawasan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai objek wisata budaya, berangkat dari fakta bahwa peninggalan budaya memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Sementara di sisi lain peninggalan sejarah dan purbakala juga merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang harus tetap dilestarikan dan dijaga keasliannya. Sehubungan dengan hal tersebut kita diperhadapkan pada dua aspek pokok, yakni tuntutan pelestarian nilai dan tinggalan budaya, serta pengembangan pemanfaatan yang dapat berdampak pada merosotnya kuantitas dan kualitas Peninggalan Sejarah Purbakala yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perencanaan yang terpadu, sinergi, dan berkelanjutan. Pembangunan kebudayaan berkelanjutan tersebut dapat dicapai apabila diawali dengan perencanaan pengelolaan pelestarian nilai dan tinggalan budaya serta pemanfaatannya, dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan masyarakat. Untuk itu perlu disusun suatu konsep pelestarian dan pengembangan pemanfaatan dalam bentuk Rencana Induk (*Masterplan*) yang dapat mewadahi seluruh kepentingan yang terkait pada kawasan ini. Dengan demikian maka diharapkan warisan budaya yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap mempertahankan kelestariannya sebagai warisan yang akan diteruskan kepada generasi mendatang.

Seiring dengan perkembangan kegiatan pelestarian maupun penelitian di kawasan karst Maros-Pangkep ini, maka ada beberapa hal yang menjadi tambahan dalam buku ini. Pertama terkait dengan penambahan peraturan perundangan yang terbaru terkait dengan cagar budaya, kedua mengenai informasi jumlah terbaru gua prasejarah di kawasan ini. Adapun muatan buku ini secara keseluruhan tetap menampilkan hasil kajian tim yang dilakukan pada tahun 2007. Akhir kata sebagai penutup, kami ucapkan semoga rencana induk ini dapat bermanfaat bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka peningkatan pembangunan Kepariwisata Nasional. Terima kasih.

Makassar, November 2013

Penerbit



DAFTAR ISI

DAFTAR PENYUSUN RENCANA INDUK		i
SAMBUTAN		ii
KATA PENGANTAR		ii - v
DAFTAR ISI		vi
BAB I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	2
B.	Tujuan	2
C.	Sasaran	3
D.	Ruang Lingkup	
BAB II.	LANDASAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	4
A.	Isu Strategis	5
B.	Pengertian	7
C.	Pendekatan	8
D.	Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan	
BAB III	SITUASI DAN KONDISI KAWASAN	10
A.	Gambaran Umum	11
B.	Kawasan Karst	12
C.	Gua-gua Prasejarah	
BAB IV	KAJIAN POTENSI DAN ANCAMAN DI KAWASAN CAGAR BUDAYA	13
A.	Potensi dan Nilai Penting	16
B.	Ancaman	
BAB V	KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN	17
A.	Misi	18
B.	Kebijakan	22
C.	Strategi	27
D.	Program	31
DAFTAR PUSTAKA		31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Situs Maros-Pangkep terletak ± 40 km di sebelah utara kota Makassar, secara administratif sebagian berada di Kabupaten Maros dan sebagian lagi di Kabupaten Pangkep. Secara astronomis berada pada koordinat 119°34'17"-119°55'13" BT dan 04°42'49"-05°06'42"LS.

Situs Maros-Pangkep mempunyai nilai penting bagi sejarah geologi di Indonesia karena mencakup morfologi karst yang terbentuk dari bahan endapan (sedimen) di dasar laut sejak kala Eosen yang kemudian secara evolusi melalui proses geologi—*gaya-gaya endogen/diastrophisme*—sehingga endapan ini mengalami perubahan struktur—*antiklinal/sinklinal*—dan terangkat ke permukaan bersamaan surutnya air laut, sebagai akibat pembekuan di kutub utara dan selatan. Proses tersebut berlangsung selama ribuan atau bahkan jutaan tahun.

Potensi Kawasan Karst Maros-Pangkep sangat kaya akan situs-situs prasejarah, lebih dari 100 gua hunian prasejarah dengan lukisan dinding gua alat-alat batu, dan sisa sampah dapur dari masa *mezolitikum* (5000 - 3000 tahun yang lalu). Mengacu pada data terbaru tahun 2012, terdapat 126 gua prasejarah di kawasan karst Maros-Pangkep. Hal ini memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan kehidupan masa lalu, budaya dan lingkungannya.

Kawasan Situs Maros-Pangkep secara hukum telah dilindungi oleh:

- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang direvisi pada tahun 2010 dengan disyahnkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- UU RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang direvisi pada tahun 2007 dengan disyahnkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993, tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya,
- Keputusan Menteri RI Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya,
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398/MENHUT-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Penetapan Kawasan Bantimurung-BuluSaraung sebagai Taman Nasional.

Potensi yang dimiliki ini menghadapi ancaman yang disebabkan oleh penambangan batu gamping untuk bahan baku pabrik semen (Bosowa dan Tonasa) serta penambangan batu marmer cukup banyak.

Kawasan situs ini perlu dikelola secara terpadu untuk menjamin kelestarian dan pemanfaatannya secara maksimal. Perlu disusun suatu Rencana Induk Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Situs Maros-Pangkep



Sebaran Gua Prasejarah di Karst Maros



Sebaran Gua Prasejarah di Karst Pangkep

B. Tujuan Belakang

C. Sasaran Belakang

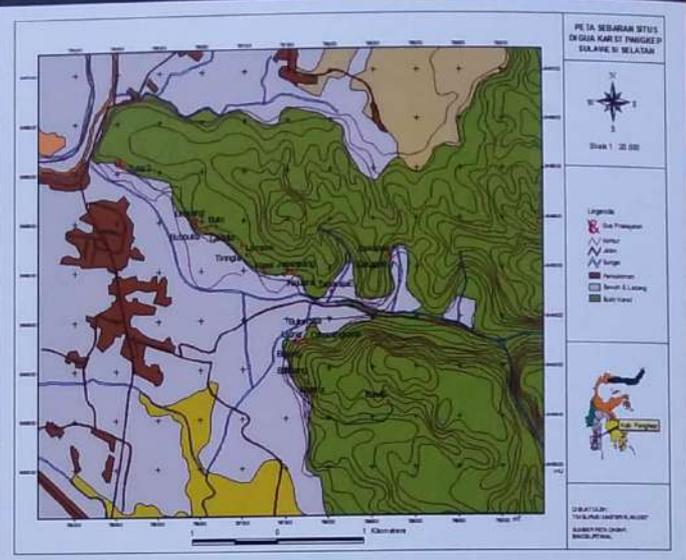


TUJUAN

1. Menyelenggarakan upaya-upaya pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya budaya dan alam.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menafsirkan nilai-nilai penting situs Gua-gua Prasejarah di Maros-Pangkep untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
3. Menyajikan nilai penting, potensi, dan pengetahuan tentang situs Gua-gua Prasejarah di Maros-Pangkep kepada masyarakat.
4. Meningkatkan peran-serta masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelestarian Situs Gua-gua Prasejarah di Maros-Pangkep.
5. Mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan pelestarian di situs Gua-gua prasejarah di Maros-Pangkep.
6. Menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan.
7. Merencanakan pembangunan infrastruktur.
8. Menjalin kerjasama dengan stakeholders.

SASARAN

1. Mengetahui potensi dan nilai penting situs.
2. Mengidentifikasi aktivitas manusia dan alam yang mengakibatkan dampak negatif bagi kawasan.
3. Mengidentifikasi potensi kepariwisataan.
4. Menyusun kerangka kerja perlindungan.
5. Membuat kerangka acuan bersama bagi pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat serta pihak-pihak lain yang peduli atau yang melakukan kegiatan di dalam kawasan.
6. Menetapkan garis-garis besar arahan manajemen situs.
7. Membuat panduan untuk evaluasi dan monitoring.



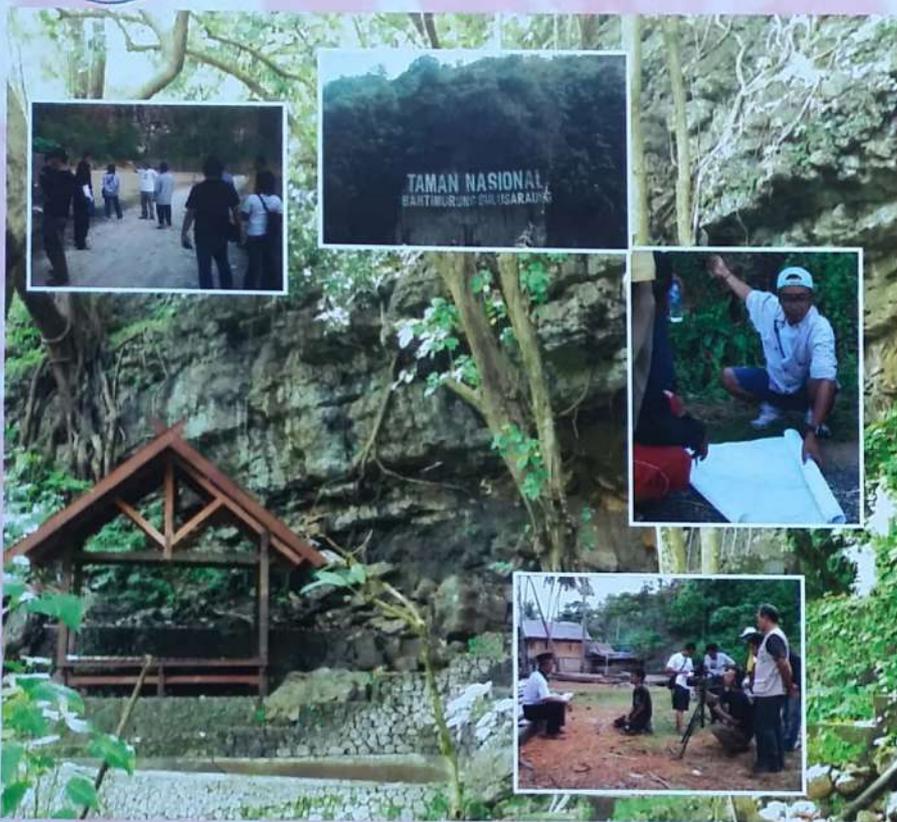


Lingkup Masterplan Maros-Pangkep adalah kawasan sebaran gua prasejarah yang diintegrasikan dengan Kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan observasi mengenai kondisi sosial-budaya masyarakat di sekitar kawasan.

Di samping itu, lingkup Masterplan ini dibatasi pada penyusunan kebijakan, strategi dan konsep pengembangan pemanfaatan kawasan gua prasejarah serta pemberdayaan masyarakat.

BAB II LANDASAN PELESTARIAN & PENGEMBANGAN

A. Isu Strategis



1. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang tersebut hanya menekankan pada Benda Cagar Budaya dan Situs. Hal ini mengakibatkan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan yang selama ini berlangsung masih menitikberatkan dan berorientasi Benda Cagar Budaya (BCB).
2. Pelestarian dan pengelolaan pada skala kawasan memerlukan penanganan dan kebijakan yang berbeda dengan pelestarian dan pengelolaan pada skala artefak dan situs.
3. Peningkatan kebutuhan ruang untuk hunian dan aktivitas pengolahan sumberdaya lingkungan dapat mengancam kelestarian kawasan purbakala.
4. Perlu adanya kebijakan yang terintegrasi antara sektor terkait, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam kawasan.
5. Kewenangan pengelolaan dan pelestarian kepurbakalaan yang sebagian sudah diberikan kepada Daerah Otonom selain memiliki dampak positif juga dapat mengakibatkan dampak negatif.



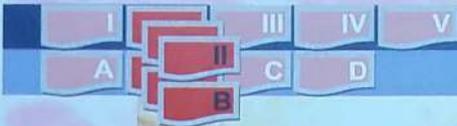


B. Pengertian



1. **Warisan budaya abstrak** adalah ekspresi, representasi, pengetahuan, keahlian yang berkaitan dengan instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya baik yang dihasilkan oleh masyarakat maupun individu.
2. **Interpretasi/pemahaman** dapat diartikan sebagai cara-cara untuk mempresentasikan/menyajikan signifikansi budaya dari sebuah tempat atau budaya yang masih berlanjut.
3. **Situs** adalah tempat yang merupakan aktivitas manusia pada masa lalu termasuk benda-benda budaya yang dihasilkan.
4. **Tempat (place)**, mencakup situs, wilayah, sebidang tanah, lokasi, lansekap, kawasan, bangunan, kelompok bangunan, dan hasil karya manusia lainnya, juga termasuk komponen ruang, dan pemandangan (*view*).
5. **Arena** adalah suatu situs, wilayah, sebidang tanah, lokasi, lansekap, kawasan, bangunan, kelompok bangunan dan hasil karya manusia lainnya, juga termasuk komponen, ruang, dan pemandangan (*view*) berikut juga kegiatan/aktivitas sosial yang terjadi di dalamnya.
6. **Konservasi (conservation)** adalah seluruh proses pemeliharaan nilai-nilai budaya, tradisi, tempat, dan peninggalan budaya untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kehidupan budaya dan peninggalannya (*tangible dan intangible*).
7. **Lansekap (landscape)** adalah suatu lingkungan fisik kawasan atau wilayah geografis dengan berbagai potensi dan sumberdaya yang terdapat didalamnya.
8. **Lansekap budaya** adalah area yang dirancang dan diciptakan secara sengaja (*intentionally*) oleh manusia, atau menunjukkan tanda-tanda sebagai hasil kegiatan awal manusia dalam bentuk kegiatan sosial, ekonomi, administratif, dan keagamaan, yang perkembangan bentuknya terkait dengan lingkungan alam. Lansekap budaya juga dapat berupa area yang tidak memiliki bukti budaya materi dan aktivitas manusia, namun berkaitan erat dengan kekuatan religius, artistik, dan elemen estetika alam.
9. **Otentisitas (authenticity)**, istilah ini mengacu pada proses dari wujud kebudayaan suatu masyarakat yang saling terkait satu sama lain. Artinya pengetahuan budaya sebagai wujud pertama menjadi acuan dalam melaksanakan tingkah laku budaya, serta dijadikan acuan dalam membentuk benda-benda budaya sebagai satu kesatuan yang erat, tanpa adanya unsur-unsur budaya yang datang dari luar yang mempengaruhi berjalannya proses perwujudan yang ada. Contoh *Ulos* (kain tenun dari Batak). Masyarakat suku bangsa Batak membuat *ulos* berdasarkan pada pengetahuan budaya tentang *ulos* itu sendiri beserta nilai-nilai dari tenunan itu sendiri, penggunaannya dan juga terdapatnya pola-pola dalam aktivitas produksinya yang juga berdasarkan pada pengetahuan budaya yang ada dan lingkungan alam yang mendukung sebagai bahan pembuat *ulos*. Konsep otentisitas sangat relatif dan unik pada setiap kebudayaan. Penggunaan metode analisis yang sebagian besar diciptakan oleh negara-negara barat perlu disesuaikan dengan konsep abstrak dan metafisik yang sudah menjadi karakter suatu masyarakat di tempat tertentu.





B. Pengertian

10. **Keberlanjutan (*sustainability*)**, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemanfaatan yang tidak hanya memandang masa sekarang, akan tetapi juga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk dapat mengkreasikan pengetahuan budayanya dalam rangka memahami lingkungan hidupnya di masa mendatang secara berkesinambungan.
11. **Pariwisata Budaya**, Secara konseptual dapat dipahami sebagai suatu "konsep pengembangan pariwisata berbasis budaya yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian budaya dan lingkungannya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat".
12. **Masyarakat Lokal**, sering diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, yang tentunya bisa terdiri dari berbagai suku bangsa tetapi menggunakan model serta pedoman budaya masyarakat lokal untuk berinteraksi antar anggota masyarakat.
13. **Stakeholder**, Dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang mempunyai beberapa ciri yang mengikat yang antara lain:
 - a. Mempunyai legalitas secara formal maupun informal,
 - b. Mempunyai wewenang serta,
 - c. Mempunyai kepentingan.Ciri-ciri tersebut berjalan sesuai dengan prosesnya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu atau kelompok lain.
14. **Heritage** dalam artian luas adalah "sesuatu yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya". Kata heritage mencakup unsur budaya dan alam yang mencakup:
 - a. **Dalam konteks budaya**, heritage termasuk dalam bentuk materi dan immateri, misalnya, artefak, monumen, tinggalan sejarah, bangunan, arsitektur, filosofi, tradisi, perayaan-perayaan, peristiwa sejarah, tata cara hidup, sastra, cerita rakyat, dan pendidikan.
 - b. **Dalam konteks alam**, heritage mencakup lansekap, taman, gunung, sungai, pulau, flora dan fauna. Dalam warisan alam ini juga memiliki komponen budaya, terutama yang memiliki makna bagi hidup manusia, seperti gunung yang disucikan.



Kebijakan makro pengembangan pariwisata nasional tertuang beberapa hal antara lain:

a. Pembangunan yang memperhatikan konservasi lingkungan alam dan pelestarian nilai budaya dan adat istiadat setempat,

b. Pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penegakan kebhinekaan dan sekaligus sebagai alat pemersatu kekuatan ekonomi dan jati diri budaya bangsa.

c. Pembangunan berbasis pelibatan masyarakat secara nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya melalui LSM, dan masyarakat.

D. Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan

PENGEMBANGAN PARIWISATA

Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- (i) kelestarian lingkungan;
- (ii) keselarasan hubungan antara wisatawan, lokasi, dan masyarakat setempat;
- (iii) keseimbangan aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keberadaan manusia;
- (iv) peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL

Pembangunan pariwisata yang mengikutsertakan pengembangan masyarakat lokal selanjutnya didasarkan pada :

- a. Memajukan taraf hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha perskala-kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
- d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
- e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen perubahan sosial, budaya, dan lingkungan ke arah perubahan yang positif dengan menekan dampak negatif seminimal mungkin.



D. Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan

ARAH KEBIJAKAN

a) Pelestarian

Pelestarian terhadap sumberdaya arkeologi yang berupa gua-gua prasejarah dan tinggalan arkeologi lainnya dilakukan secara terintegrasi dengan situs dan lingkungannya sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian arkeologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelestarian yang dimaksud mencakup perlindungan (secara fisik dan regulasi), pemeliharaan, rehabilitasi, pemugaran, dan penataan lingkungan situs.

b) Pemanfaatan

Pemanfaatan terhadap sumberdaya arkeologi dalam lingkup studi master plan ini adalah pemanfaatan secara proporsional sesuai dengan nilai penting dan potensi sumberdaya. Dalam pemanfaatannya harus terintegrasi untuk kemanfaatan pendidikan, wisata budaya, dan sosial masyarakat, mengakomodasi kepentingan kalangan akademik, pemerintah, dan masyarakat.



c) Pengembangan

Pengembangan terhadap sumberdaya lingkungan (fisik, biotis, dan budaya) dapat dilakukan, namun secara terbatas dan terkendali dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kelestarian dan kemanfaatan sumberdaya budaya yang ada. Pengembangan dan pemanfaatan untuk kepentingan wisata yang paling sesuai dengan potensi dan nilai penting sumberdaya adalah pengembangan wisata pendidikan (*educational tourism*) lintas disiplin ilmu (arkeologi, sejarah, budaya, biologi, geografi, geologi, dan sebagainya) yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang ada.

d) Terintegrasi

Pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan terhadap sumberdaya yang berada di dalam lingkup studi master plan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak harus secara terintegrasi, sehingga upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan dapat memperoleh manfaat yang optimal.

e) Pelibatan stakeholder

Pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan terhadap sumberdaya yang berada di dalam lingkup studi master plan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi dengan melibatkan semua pihak yang terkait (stakeholder).

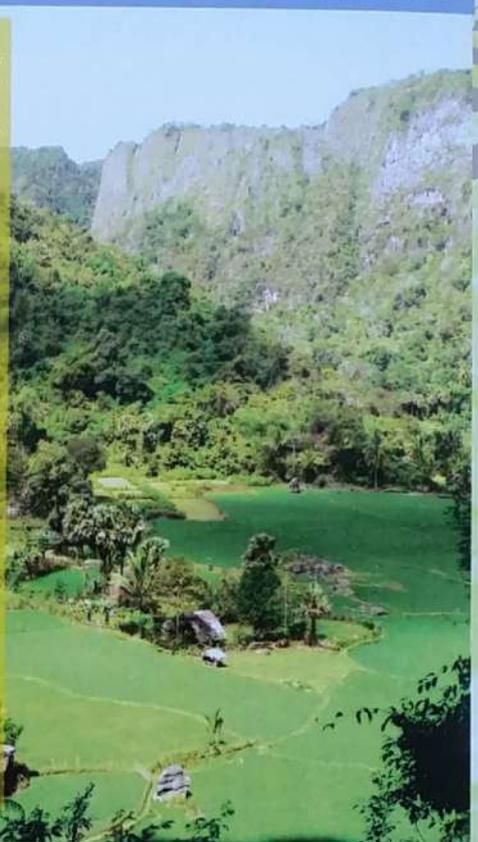


Wilayah geografis Maros-Pangkep merupakan hamparan dataran rendah dan bukit-bukit kapur berbentuk menara, berinding terjal dengan ketinggian antara 150 m dan 300 m. Jajaran bukit membentang dari Timur ke Barat, pada lereng yang tidak begitu terjal dan daerah cekukan yang tidak dalam, tumbuh beberapa jenis tumbuhan yang umumnya merupakan tipe tumbuhan hutan dataran rendah.

Dari jauh karst Maros-Pangkep hanya sebuah gunung gamping yang menjulang dengan tebing-tebing yang tegak lurus dan tidak mempunyai kekayaan apapun selain gamping. Namun justru di balik gunung-gunung itu tersimpan kekayaan keindahan alam dan keunikan kehidupan bawah tanah yang gelap yang belum banyak diketahui masyarakat serta tempat gua-gua hunian pada masa prasejarah.

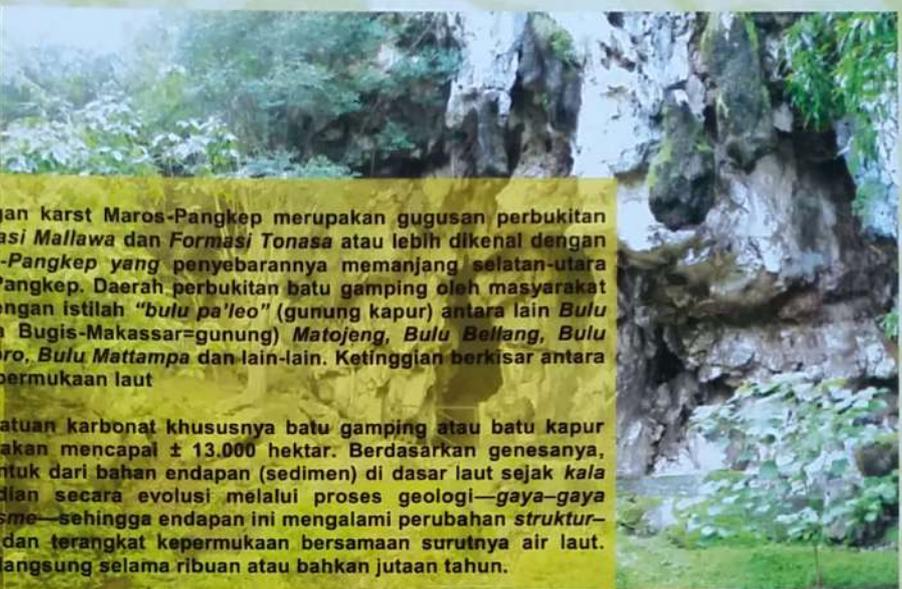
Wilayah Maros-Pangkep umumnya dipengaruhi iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan November hingga April dan musim hujan antara bulan Mei hingga Oktober. Temperatur udara pada kisaran 21°C - 31°C atau rata-rata $26,4^{\circ}\text{C}$, dengan suhu kelembaban udara yang tidak merata.

Luas kawasan hutan lindung Maros-Pangkep seluas ± 21.631 hektar dari total luas hutan sekitar 32.503 hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan lindung berada di kawasan karst yang menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Babul) serta memiliki berbagai jenis flora antara lain: Bintangur (*Calophyllum* sp.), Beringin (*Ficus* sp.), Enau (*Arenga pinnata*), Nyato (*Pala quium obtusifolium*), beberapa dari suku *Homalanthus*, *Lagerstroemia*, *Pterospermum*, *Kleinho via*, *Villebrunea* dan beberapa flora endemik diantaranya kayu Hitam Sulawesi (*Diospyros celebica*) dan kayu Sepang atau Sappang (*Caesalpina sappan*), jenis kayu ini digunakan penduduk setempat sebagai bahan campuran air minum.





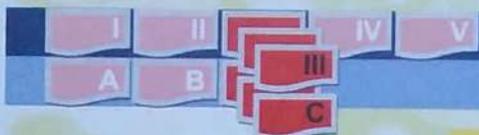
B. Kawasan Karst Maros-Pangkep



Morfologi pegunungan karst Maros-Pangkep merupakan gugusan perbukitan batu gamping *Formasi Mallawa* dan *Formasi Tonasa* atau lebih dikenal dengan istilah *Karst Maros-Pangkep* yang penyebarannya memanjang selatan-utara dari Maros hingga Pangkep. Daerah perbukitan batu gamping oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah "*bulu pa'leo*" (gunung kapur) antara lain *Bulu* (bulu dalam bahasa Bugis-Makassar=gunung) *Matojeng*, *Bulu Bellang*, *Bulu Sipong*, *Bulu Lamporo*, *Bulu Mattampa* dan lain-lain. Ketinggian berkisar antara 100–600 meter dari permukaan laut

Sebaran endapan batuan karbonat khususnya batu gamping atau batu kapur (*limestone*) diperkirakan mencapai \pm 13.000 hektar. Berdasarkan genesanya, batu gamping terbentuk dari bahan endapan (sedimen) di dasar laut sejak *kala Eosen* yang kemudian secara evolusi melalui proses geologi—*gaya-gaya endogen/diastrophisme*—sehingga endapan ini mengalami perubahan *struktur-antiklinal/sinklinal*— dan terangkat kepermukaan bersamaan surutnya air laut. Proses tersebut berlangsung selama ribuan atau bahkan jutaan tahun.





C. Gua-gua Prasejarah



Kompleks gua-gua prasejarah yang terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, adalah sekelompok gua-gua hunian manusia prasejarah yang secara umum masuk dalam Bentangan Karst Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Kawasan Karst Maros-Pangkep sangat kaya akan situs-situs prasejarah dengan lukisan dinding gua dan kandungan data arkeologinya. Selain itu, situs-situs ini sudah sejak dulu mendapat perhatian dari para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian-penelitian oleh A.R. Wallace (ahli biologi) serta Paul dan Fritz Sarasin (Naturalis dari Swiss tahun 1902-1903), P.V. van Stein Callenfels, H.R. van Heekeren, Mulveney dan R.P. Soejono serta ahli-ahli arkeologi lainnya.



Di gua-gua prasejarah tersebut banyak ditemukan artefak batu berupa kapak genggam, flakes, bilah, mata panah bergerigi, sisa-sisa sampah dapur (tumpukan kulit kerang) dan tulang binatang di dalam gua dan di pelataran gua. Dari temuan yang ada di dalam gua dan di pelataran gua prasejarah Maros-Pangkep, para peneliti menyimpulkan bahwa alat-alat batu tersebut berasal dari masa mesolitikum yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan.



Selain alat-alat batu tersebut di atas juga ditemukan lukisan, yang digambarkan pada dinding dan langit-langit gua serta stalaktik. Hasil seni lukis ini adalah hasil seni paling tua yang ditemukan di Indonesia. Lukisan tersebut berupa gambar telapak tangan, telapak kaki, babi rusa, ikan, gambar alat batu, garis-garis berwarna merah atau hitam, negatif atau positif. Lukisan positif hanya ada pada gambar telapak tangan dan kaki, sedangkan pada lukisan lain berupa gambar negatif. Dari sampah dapur beserta alat-alat batu yang ditemukan dan telah menyatu dengan tanah, dapat disimpulkan bahwa pada zaman mesolitikum, manusia telah menghuni gua-gua prasejarah Maros-Pangkep.



0 cm 5



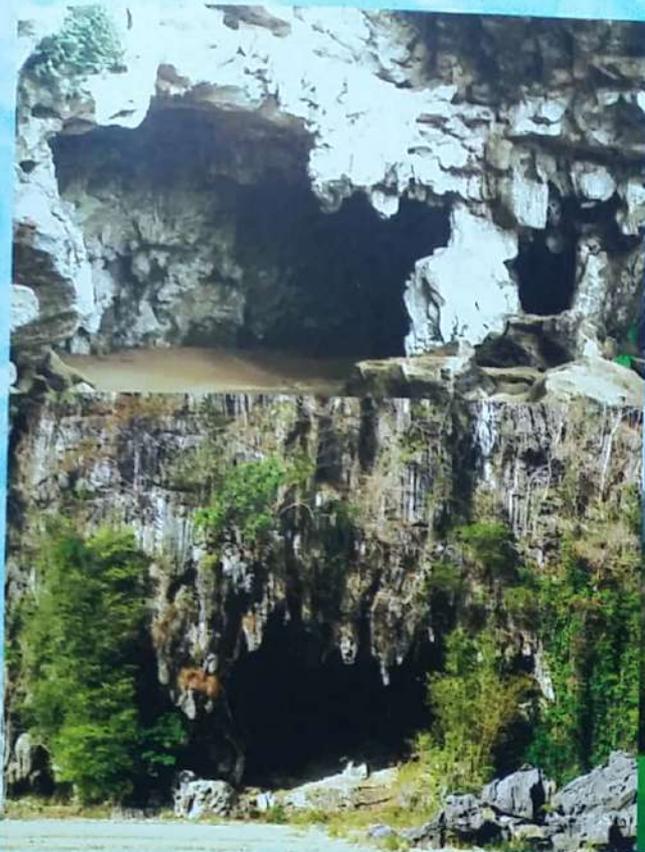
1. Parameter Nilai Penting

Setidaknya, ada tiga sudut pandang dalam melihat nilai penting suatu sumberdaya budaya, termasuk suatu kawasan cagar budaya. Ketiga sudut pandang tersebut didasarkan atas tiga azas : kegunaan (*use value*), pilihan (*option value*), dan keberadaan (*existence value*).

Berdasarkan *azas kegunaan*, suatu sumberdaya budaya mempunyai nilai penting apabila dapat memberikan manfaat pada saat ini. Manfaat itu bisa saja beragam, baik bersifat material maupun non-material.

Azas pilihan menekankan pada tekad untuk menyelamatkan BCB sebagai warisan untuk generasi mendatang. Karena itu, prinsip utamanya adalah menjaga agar sumberdaya budaya dapat dipertahankan selama mungkin sehingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Azas keberadaan berpandangan bahwa yang paling penting adalah sumberdaya budaya itu tetap ada, walau pun kini kegunaannya tidak dirasakan sama sekali. Kepuasan pendukung azas ini tercapai kalau mereka mendapatkan kepastian bahwa sumberdaya itu akan bertahan (*survive*) atau tetap eksis (*in existence*).





A. Potensi dan Nilai

2. Nilai Penting Kawasan Karst Maros-Pangkep

Kawasan Karst Maros-Pangkep sangat kaya akan situs-situs prasejarah dengan lukisan dinding gua dan kandungan data arkeologinya. Kajian-kajian yang telah dilakukan di kawasan ini telah banyak menghasilkan pengetahuan tentang kehidupan manusia masa lampau.

1. Nilai Penting Sejarah

- a. Kawasan Cagar Budaya Maros-Pangkep mengandung **bukti-bukti kehidupan manusia masa prasejarah**, sejak sekitar 30.000 tahun yang lalu hingga sekitar 2000 tahun lalu.
- b. Kawasan ini penting bagi **sejarah perkembangan ilmu biologi dan arkeologi**, terutama dengan adanya penelitian-penelitian oleh A.R. Wallace (ahli biologi) serta Paul dan Fritz Sarasin, P.V. van Stein Callenfels, dan H.R. van Heekeren (ahli-ahli arkeologi) yang menjadi pelopor dalam bidang ilmu masing-masing.

2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

- a. **Arkeologi**. Kawasan ini telah menjadi tempat penelitian arkeologi sejak akhir abad ke-19 hingga kini, baik oleh para ahli dari Indonesia maupun mancanegara guna pengembangan ilmu arkeologi, baik secara teoritis, metodologis, analitis, maupun teknis penanganan Benda Cagar Budaya.
- b. **Ilmu Kebumihan**. Kawasan yang didominasi oleh fenomena karst ini menyediakan data yang penting dalam pemahaman tentang proses karstifikasi, baik yang terjadi di lingkungan dalam (endokarst) maupun di luar (eksokarst).
- c. **Ilmu Hayat (biologi)**. Kekhasan fauna dan flora di kawasan ini sangat penting bagi kajian ilmu hayat atau biologi, terdapat satwa-satwa langka (a.l. tarsier) dan endemik (a.l. keragaman jenis kupu-kupu).



3. Nilai Penting Kebudayaan

- Pendidikan.** Di kawasan ini terdapat beragam sumberdaya alam maupun budaya, diantaranya sejarah budaya, sejarah alam dan proses geologi yang hingga kini masih berlangsung, berbagai aspek ilmu hayat dan konservasi alam, juga tentang arkeologi dengan segala aspek metodologinya (termasuk upaya-upaya pelestariannya).
- Estetika.** Keberadaan lukisan dinding gua di kawasan ini menjadi bukti estetika yang berkembang sejak masa prasejarah, dan hal ini dapat menjadi ilham seni bagi banyak orang. Selain itu, paduan alam yang ada, antara sawah-sawah hasil garapan masyarakat dengan bentang alam karst yang alami, telah menghadirkan keindahan alam yang khas, sehingga merupakan kekayaan estetika tersendiri.
- Jatidiri.** Di kawasan ini, terdapat berbagai unsur alam dan budaya yang khas dan jarang ditemukan di tempat lain. Karena itu, kawasan ini sangat berpotensi untuk menjadi identitas atau jatidiri atau ikon yang meningkatkan citra masyarakat yang ada di daerah ini, atau seluruh Propinsi Sulawesi Selatan, atau bahkan juga bagi Bangsa Indonesia umumnya.
- Wisata.** Dengan kekhasan yang ada di kawasan ini, baik alam maupun budayanya, serta keindahan alam yang dihadirkan oleh kawasan ini, potensinya untuk dikembangkan sebagai tempat wisata menjadi sangat besar.
- Pemberdayaan Masyarakat.** Adanya kegiatan wisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).



B. Ancaman

Kawasan Cagar Budaya Maros–Pangkep terbukti memiliki nilai penting yang tinggi, namun sumberdaya budaya itu juga tidak terlepas dari ancaman oleh beberapa sektor. Se jauh ini, beberapa jenis ancaman yang dapat diidentifikasi maupun diprediksikan adalah :

1. **Penambangan gamping dan marmer.** Di sekitar kawasan cagar budaya Maros-Pangkep terdapat aktivitas penambangan baik yang bersifat perorangan maupun perusahaan.
2. Dari data kependudukan, terlihat adanya kecenderungan **penambahan penduduk yang relatif cukup besar**, mengakibatkan kebutuhan lahan yang dikerjakan juga meningkat. Karena itu, upaya untuk mengendalikan dan mencegah perubahan tata guna lahan yang ada perlu dilakukan, lewat penataan dan penetapan regulasi.
3. **Pemanfaatan gua oleh Penduduk.** Hingga kini, sebagian penduduk yang tinggal di sekitar situs-situs gua prasejarah masih memanfaatkan gua-gua itu sebagai tempat untuk menyimpan peralatan pertanian, makanan ternak, dan bahkan ternaknya sendiri. Pemanfaatan ini tentu akan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan pada situs.
4. **Persepsi masyarakat terhadap tinggalan arkeologi.** Penduduk setempat kurang berperan serta dalam melindungi cagar budaya yang ada, sehingga tinggalan-tinggalan yang ada lebih terbuka terhadap ancaman.
5. **Kegiatan wisata.** Kunjungan wisatawan dalam jumlah yang lebih besar tentu akan lebih berpeluang menimbulkan kerusakan sumberdaya arkeologi yang ada. Karena itu, perencanaan pengembangan wisata harus memperhitungkan hal ini, dan perlu dilakukan mitigasi terhadap segala kemungkinan kerusakan dan pencemaran yang terjadi dalam kawasan.





1. Melestarikan bentang alam, potensi alam dan potensi budaya Kawasan Maros-Pangkep yang unik dan sangat penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.
2. Menciptakan jalinan kerjasama yang terpadu antar seluruh *stakeholders*, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan Kawasan Maros-Pangkep
3. Menciptakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Melakukan penelitian yang berkelanjutan untuk menginterpretasikan nilai-nilai penting Kawasan Maros-Pangkep demi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
5. Menyajikan informasi mengenai Kawasan Maros-Pangkep kepada masyarakat, baik bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan.
6. Menjadikan Kawasan Maros-Pangkep sebagai pusat informasi dan pengkajian data tentang manusia prasejarah di Sulawesi Selatan.
7. Menyajikan nilai-nilai penting dan pengetahuan tentang situs gua prasejarah, baik bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan kepada masyarakat.
8. Mengembangkan wisata minat khusus yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pointer 4°50'19.40" S 119°36'47.30" E elev 57 ft

Streaming 100%

Eye alt 13610 ft



1. Pengelolaan Situs

Situs Maros-Pangkep perlu dikelola secara khusus sehingga dapat menjamin aspek pelestariannya (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) serta penelitian.

Perlu diciptakan sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat.

Menghindari/menekan seminimal mungkin dampak yang kurang menguntungkan bagi penduduk setempat Tidak banyak mengubah bentang alam dan budaya situs.

Melakukan pembebasan lahan pada lokasi yang dianggap potensial tetapi rawan kerusakan, untuk menjamin terlindunginya potensi yang ada dan menjamin tersajikannya informasi bagi masyarakat luas.

Membuat regulasi yang disepakati bersama untuk mengatur aktivitas penduduk dalam memanfaatkan lahan yang berdampak negatif terhadap kelestarian situs dan kandungannya.

2. Pengembangan Pariwisata

Berwawasan pelestarian

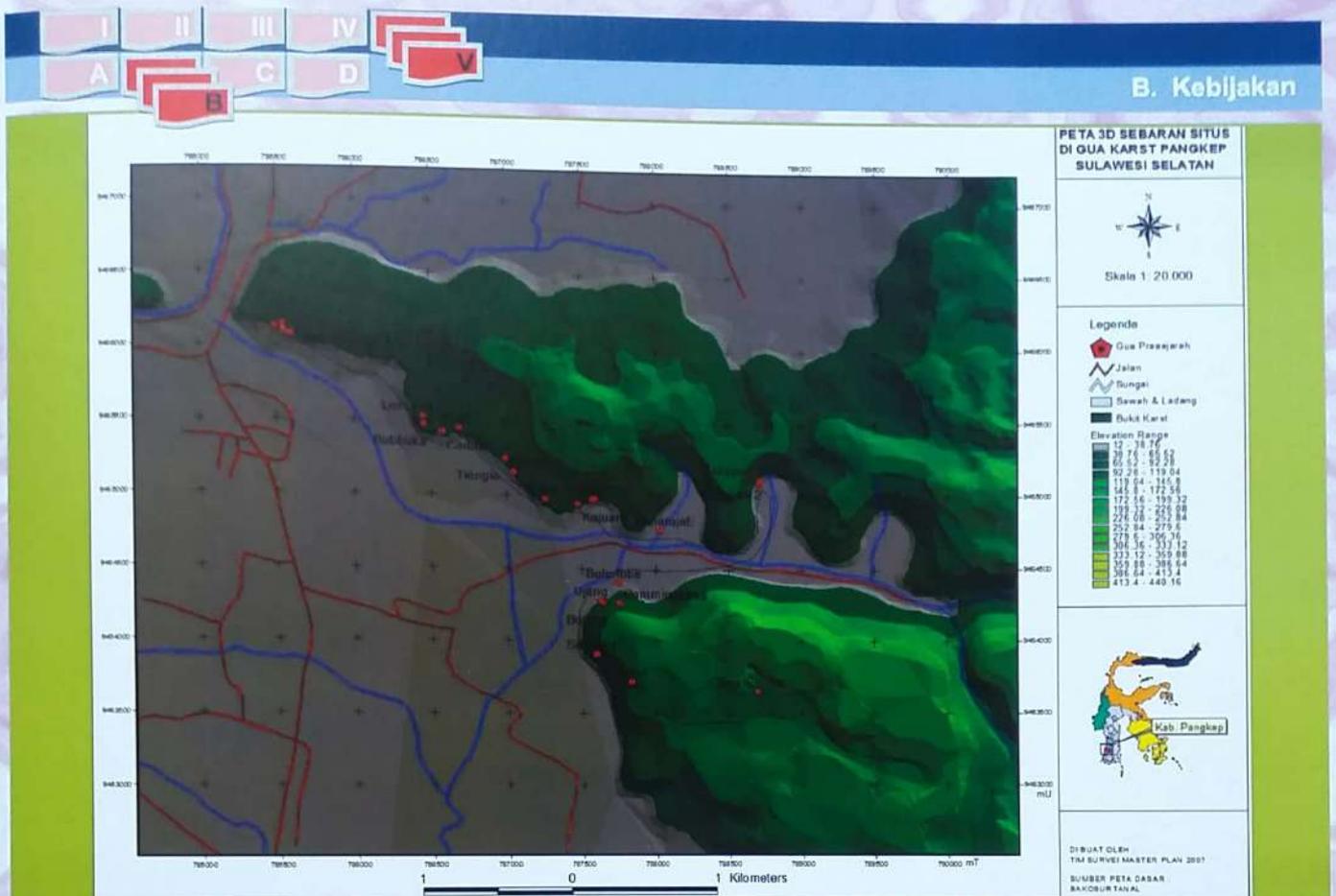
Diarahkan untuk menumbuhkan apresiasi bagi masyarakat sejak usia dini terhadap nilai penting situs gua-gua prasejarah sebagai warisan budaya dan jati diri bangsa.

Diselenggarakan dengan menghormati nilai budaya serta hak kepemilikan dan hak ulayat masyarakat.

Dapat dinikmati oleh pengunjung dengan diperkaya atraksi-atraksi budaya, agar dapat merasakan nilai penting situs dan kandungannya.

Diarahkan kepada wisata minat khusus, dengan mengedepankan aspek ramah lingkungan.

B. Kebijakan

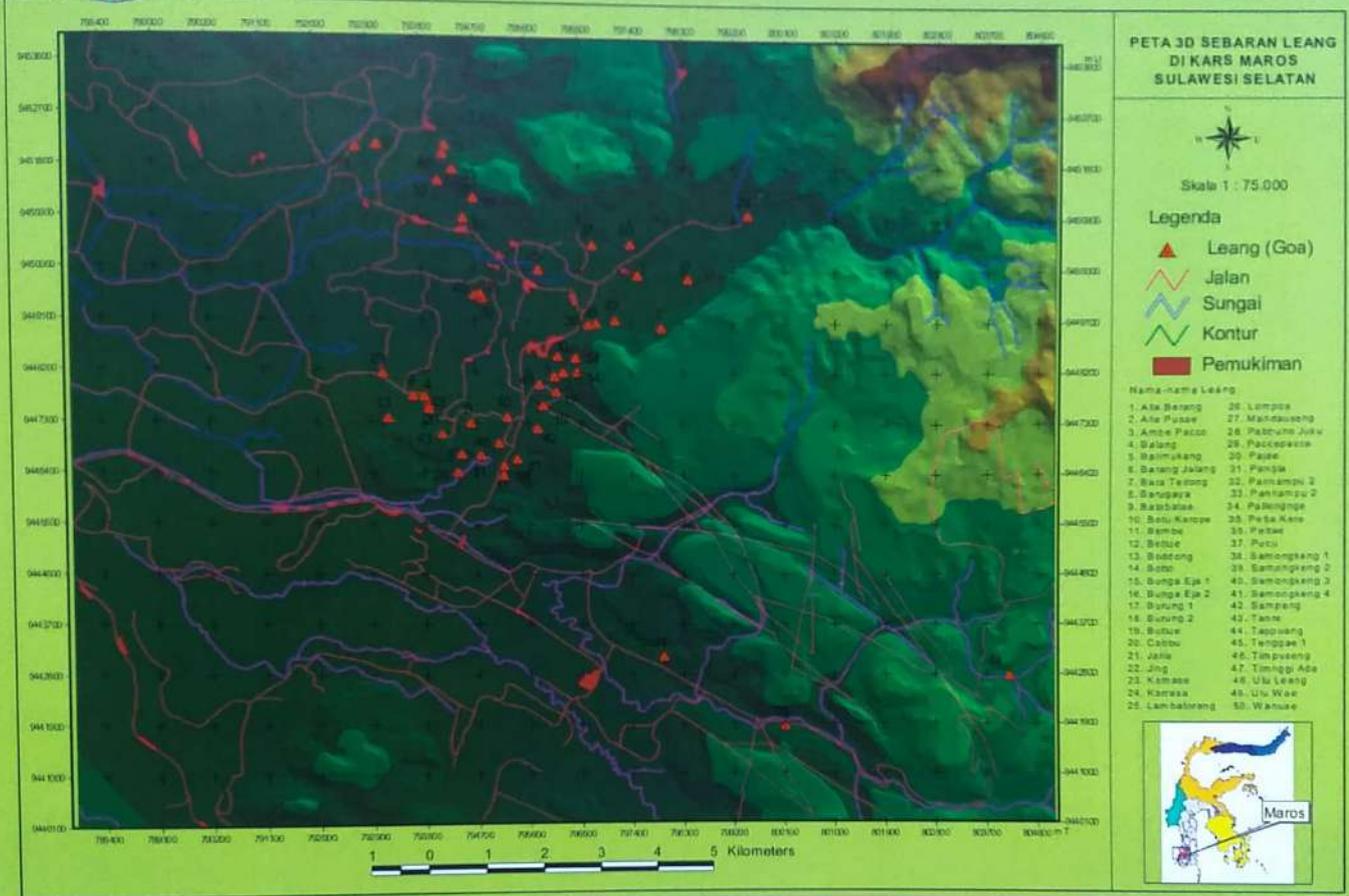


Rencana Induk (Masterplan) Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Sebagai Destinasi Wisata

B. Kebijakan

RENCANA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KAWASAN KARST BELLAE -PANGKEP





Rencana Induk (Masterplan) Pelestarian dan Pengembangan Gua-Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Sebagai Destinasi Wisata

B. Kebijakan

RENCANA PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KAWASAN KARST MAROS





C. Strategi

1. Pengelolaan Situs

Membentuk lembaga pengelola dan menyusun struktur organisasi pengelola situs Gua-Gua Prasejarah Maros-Pangkep, yang bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Membagi Kawasan Gua-gua di Kawasan Kasrt Maros-Pangkep dalam zonasi/pemintakatan situs berdasarkan potensi geologi, stratigrafi, paleoantropologi, dan arkeologi - dengan mempertimbangkan besarnya potensi ancaman yang dihadapi - yang terdiri dari (a) Mintakat Inti, (b) Mintakat Penyangga, (c) Mintakat Pengembangan Terbatas.

2. Pengembangan Pariwisata

- a. Menghindari munculnya dampak negatif akibat aktivitas atau perilaku pengunjung, dan menghindari penyediaan sarana dan program/kegiatan yang tidak ramah lingkungan.
- b. Mencegah pencurian dan perdagangan artefak dan ekofak.
- c. Sebagian pendapatan diperuntukkan untuk upaya-upaya pelestarian situs.
- d. Pengaturan pengunjung untuk menghindari dampak negatif pelestarian situs.
- e. Menetapkan ketentuan dan mensosialisasikan pelaksanaan wisata.
- f. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga dan stakeholders, untuk memastikan pelestarian dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- g. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menyampaikan informasi bagi pengunjung demi kualitas pengalaman dan pengetahuan.
- h. Menggunakan bahan-bahan lokal, gaya arsitektur setempat dan unsur-unsur tradisi setempat.
- i. Mengembangkan cara pemantauan berkelanjutan dan evaluasi secara berkala terhadap keglatan wisata di dalam kawasan.



SISTEM PENENTUAN ZONASI

Sistem penentuan batas zona ini penting untuk menciptakan ruang-ruang dengan regulasi yang jelas mengenai kebijakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan situs. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan batas-batas zona dimasing-masing situs antara lain:

a. Zona Inti

Batas-batas sebaran temuan arkeologis berdasarkan hasil survei, ekskavasi, atau hasil studi arkeologi lain yang dapat menentukan batas asli situs; Penentuan dengan arbitrase dengan mempertimbangkan aspek-aspek geografis dapat dilakukan apabila cara pertama tidak dapat dilakukan; Kelayakan pandang dan keserasian lingkungan, batas-batas situs harus memberikan ruang yang cukup untuk pengapresiasian situs secara utuh dan lingkungan di sekitar tinggalan arkeologi mencerminkan/menggambarkan lingkungan asli situs pada masanya; Ketersediaan lahan dan kepentingan masyarakat di sekitar situs; Rencana pengembangan dan pemanfaatan kawasan yang terintegrasi dengan berbagai bidang kepentingan lainnya. Dalam zona ini, lahan hanya dapat dimanfaatkan semata-mata untuk aktifitas pelestarian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Selain itu untuk mengakomodir kepentingan pemanfaatan, maka dengan pertimbangan tertentu, area ini dapat dimanfaatkan untuk perkunjungan.

b. Zona Penyangga

Luas Lahan Penyangga pada medium karst dibatasi oleh garis lingkaran berjarak 300 m dari batas luar zona inti dengan pertimbangan keseimbangan dan keserasian lingkungan (tinggi rata-rata menara karst di kawasan ini adalah 300 m), regulasi mengenai efek peledakan untuk penambangan gamping, serta hasil-hasil penelitian mengenai masalah yang sama, menyimpulkan bahwa jarak tersebut dapat ditolerir dengan ketentuan penggunaan jenis dan jumlah bahan peledak yang digunakan juga turut diatur. Pada lahan di luar bidang karst (dataran rendah pemukiman), luas zona ini ditentukan berdasarkan kebutuhan akan ketersediaan lahan untuk mempertahankan lingkungan asli situs. Ruang lahan yang tersedia harus mampu menyediakan lingkungan yang ideal bagi tumbuh dan berkembangnya ekosistem yang mendukung keamanan lahan inti. Mampu berfungsi sebagai stabilisator lingkungan—mikro maupun makro—bagi lahan inti dan mendukung keseimbangan dan keserasian lingkungan secara luas yang mencerminkan lingkungan asli situs di masa lampau. Ketersediaan lahan dan kepentingan masyarakat terhadap lahan pencaharian menjadi pertimbangan dalam menentukan batas dan luas lahan penyangga. Zona ini diprioritaskan untuk perlindungan situs dan kegiatan-kegiatan yang mendukung sistem pelestariannya. Pembangunan fasilitas tertentu dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan pelestarian dan pengembangan untuk meminimalisir efek-efek kegiatan pemanfaatan yang sulit kendalikan.

c. Zona Pengembangan

Berada di luar lahan inti dan lahan penyangga, serta tidak memberikan efek buruk terhadap kedua zona tersebut. Terletak di lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan dan pemanfaatan. Strategis dan terjangkau, serta mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur pengembangan. Tidak mengganggu tatanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan, maka di lahan ini dapat dilakukan berbagai bentuk pengembangan dan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang sektor-sektor dan kepentingan lainnya. Namun demikian, diharapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat merugikan sistem pelestarian, termasuk keserasian lingkungan dan partisipasi masyarakat setempat.





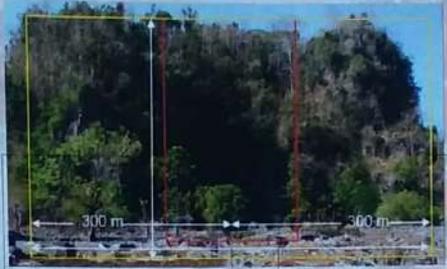
C. Strategi

PETA SEBARAN GUA PRASEJARAH DAN ZONA BABUL



- Keterangan :
- Jaringan jalan
 - Gua prasejarah
 - Leang pangkep
 - Batas kab
 - Babul
 - Jln_arteri
 - Pemukiman
 - Jln_lokal
 - Kontur

SISTEM PENETAPAN LUASAN LAHAN MINTAKAT

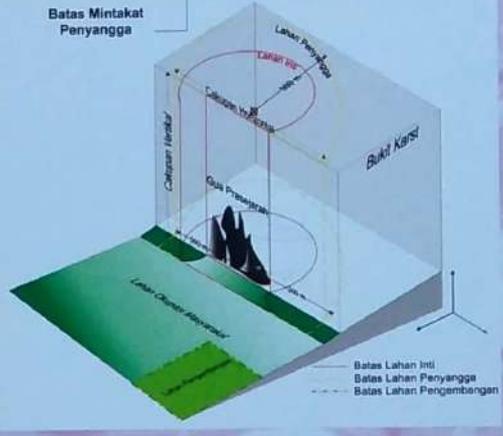


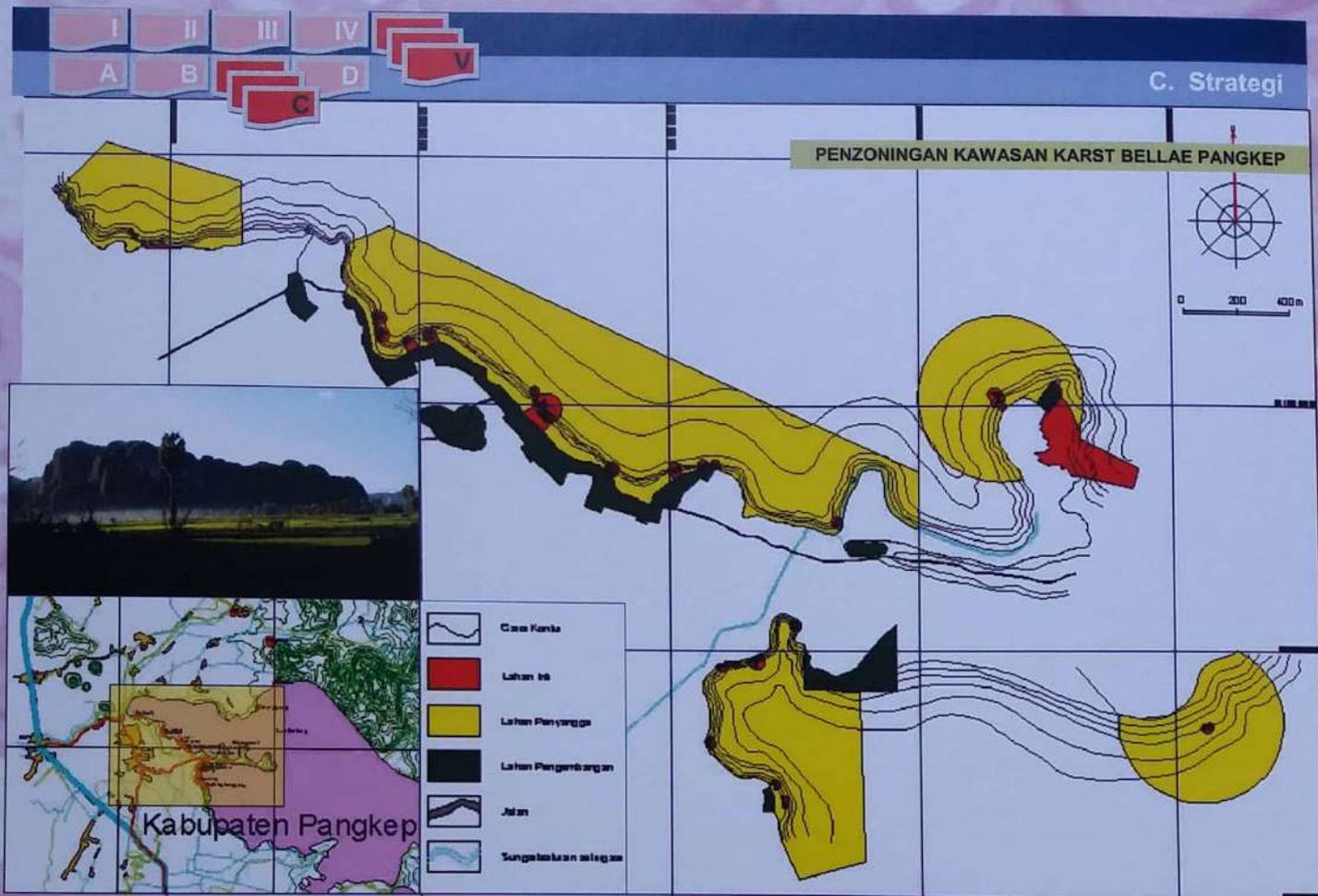
Cakupan mintakat vertikal

Batas Mintakat Inti

Cakupan mintakat Horizontal

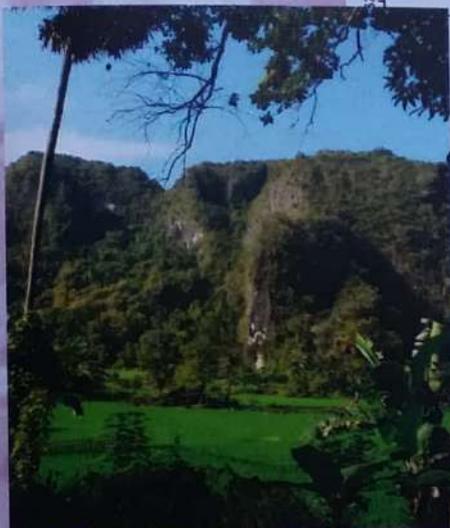
Batas Mintakat Penyangga



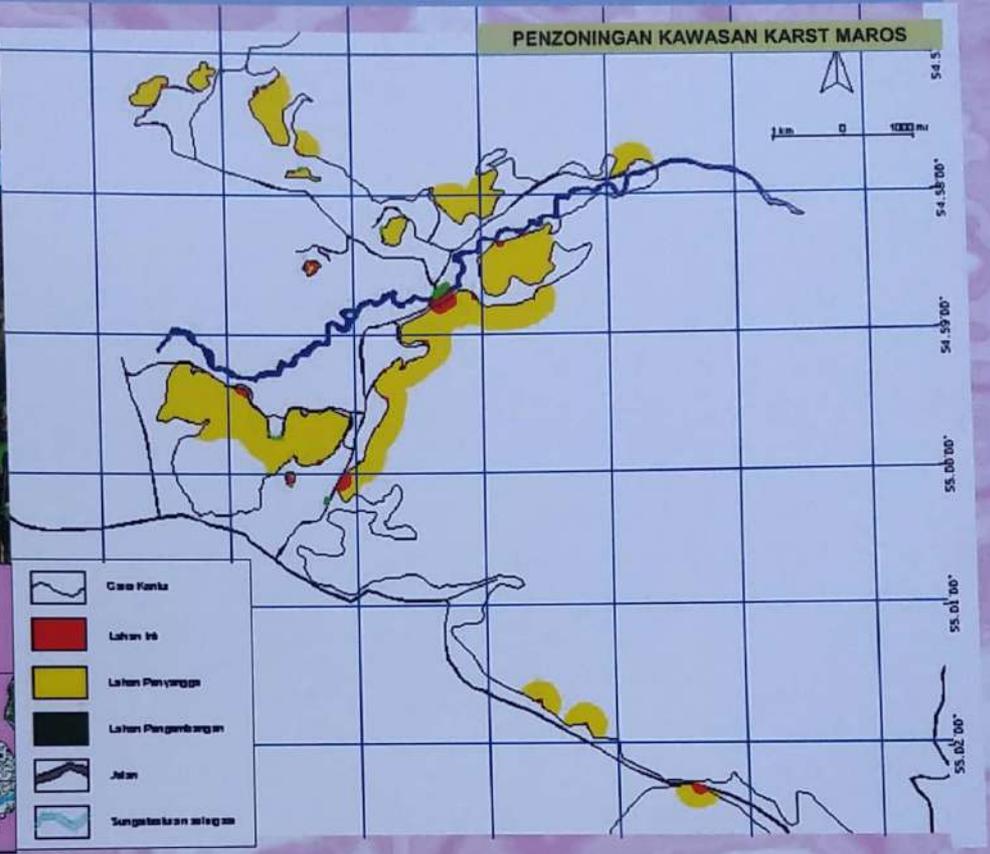


C. Strategi

PENZONINGAN KAWASAN KARST MAROS



- Cara Karst
- Lahan Bas
- Lahan Periyangan
- Lahan Pengembangan
- Jalan
- Sungai/koridor sungai



D. Program

PROGRAM	JANGKA		
	PEDEK	MENENGAH	PANJANG
DAYA TARIK	Identifikasi destinasi siap jual. Studi Kelayakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Purbakala (<i>Feasibility Study</i>).	Pengembangan Destinasi unggulan. Pengembangan Basis data peta potensi. <i>Pilot Project</i> Destinasi siap jual.	Pengembangan Destinasi. Pengembangan dan pemutakhiran basis data peta potensi. <i>Pilot Project</i> Destinasi siap jual.
AMENITAS	Penilaian standar akomodasi dan Rumah Makan (RM). Pengembangan <i>Homestay and camping ground</i> .	Pengembangan akomodasi dan RM berbasis kelokalan untuk skala kecil menengah. Penilaian <i>Homestay and Camping Ground</i> .	Evaluasi akomodasi dan RM berbasis kelokalan untuk skala kecil menengah. Diversifikasi usaha dan layanan akomodasi dan RM.

D. Program

PROGRAM	JANGKA		
	PENDEK	MENENGAH	PANJANG
AKSESIBILITAS	Penilaian standar sarana transportasi. Pengadaan sarana air bersih, sampah, dan papan penunjuk (<i>signage</i>).	Pengembangan sarana transportasi. Pengembangan sarana air bersih, sampah, dan papan penunjuk (<i>signage</i>).	Pengembangan sarana transportasi. Pengembangan sarana air bersih, sampah dan papan penunjuk (<i>signage</i>).
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Pembekalan <i>tour guide</i> dan <i>tour operator</i> . Pembekalan masyarakat sebagai <i>interpreter</i> lingkungan. Pelatihan <i>Risk and Security</i> .	Sosialisasi pemahaman ekowisata. Pelatihan <i>tour guide</i> dan <i>tour operator</i> . Pelatihan masyarakat sebagai <i>Interpreter</i> lingkungan. Pelatihan <i>Risk and Security</i> . Pelatihan Basis data peta potensi	Sosialisasi pemahaman ekowisata. Pelatihan <i>tour guide</i> dan <i>tour operator</i> . Pelatihan masyarakat sebagai <i>Interpreter</i> lingkungan. Sosialisasi <i>Risk and Security</i> . Sosialisasi Basis data peta potensi.





D. Program

PROGRAM	JANGKA		
	PENDEK	MENENGAH	PANJANG
PRODUK WISATA	Diversifikasi paket kegiatan ekowisata.	Pengembangan paket kegiatan ekowisata. Pengembangan paket ekowisata dengan produk wisata lain.	Evaluasi paket kegiatan ekowisata. Pengembangan paket ekowisata dengan produk wisata lain.
KEBIJAKAN	Sosialisasi standar dan pedoman minimal. Penetapan tarif dan distribusi pendapatan. Sinkronisasi aturan formal dan informal	Perumusan standar dan pedoman. Pengembangan sistem tarif, insentif dan investasi. Studi kebijakan teknis.	Sosialisasi standar dan pedoman. Sosialisasi dan evaluasi sistem tarif, insentif dan investasi. Sosialisasi kebijakan teknis.





D. Program

PROGRAM	JANGKA		
	PENDEK	MENENGAH	PANJANG
INFORMASI	Penetapan <i>branding</i> . Pengadaan bahan promosi. Pengadaan pusat Informasi.	Pengembangan <i>branding</i> . Pengadaan bahan promosi. Pengembangan pusat informasi.	Penguatan <i>branding</i> . Pengadaan bahan promosi. Pengembangan pusat informasi.
PEMASARAN	Promosi dan Kampanye destinasi. Partisipasi pada <i>event</i> nasional dan internasional.	Penelitian pasar dan <i>Customer satisfaction</i> . Promosi dan Kampanye destinasi. Partisipasi pada <i>event</i> nasional dan internasional.	Penelitian pasar dan <i>Customer satisfaction</i> . Promosi dan Kampanye destinasi. Partisipasi pada <i>event</i> nasional dan internasional.



- Anonim, 1992. *The Yogyakarta Declaration on National Cultures and Universal Tourism*, dalam *The International Conference on Cultural Tourism*, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, 24 – 26 November 1992.
- Anonim, 1997. *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Ap, John dan John L. Crompton, 1998. *Developing and Testing a Tourism Impact Scale*. *Journal of Traveling Research*, Vol. 37, November: 120-130.
- Ayala, H. 1996. *Resort ecotourism: A Paradigm for the 21 century*. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quartely*, 37 (5): 46-53.
- Cleere, H.F. (ed), 1984. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwyn Hyman.
- Djoekardi, Arie Dj. dan Bambang Setyabudi, 1998. *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Faulkner, Bill., 1997. Perkembangan Pariwisata di Indonesia: Perspektif "Gambaran Besar", dalam Myra P. Gunawan, (ed.), *Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Gunawan, Myra P. , 1997. Pariwisata di Indonesia: Dulu, kini, dan yang akan datang, dalam Myra P. Gunawan (ed.), *Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Hartanto, Frans Mardi., 1997. Menjelang Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan: Perspektif Perencanaan Kebijakan, dalam Myra P. Gunawan (ed.), *Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Haryadi, 1995. Kemungkinan Penerapan Konsep Sistem Seting Dalam Penemuan dan Penataan Ruang Kawasan, dalam *Berkala Arkeologi* Tahun XV, Edisi Khusus, him. 5 - 9. Yogyakarta: Balai Arkeologi.
- Higgins, Bryan R. 1996. *The Global Structure of the Nature Tourism Industry: Ecotourists, Tour Operator, and Local Businesses*. *Journal of Travel Research*, (Fall): 11-18.

- Inskeep, E., 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Karyono, A. Hari, 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Rasindo.
- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Keputusan Mendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kodhyat, H., 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rasindo.
- Luzar, E.J. 1998. *Profiling the nature-based tourist: A multinomial logit approach*. *Journal of Travel Research*, 37 (August): 48-55.
- MacLeod, Donald G. 1977. *Peddle or Perish: Archaeological Marketing from Concept to Product Delivery*, dalam Michael B. Schiffer and George J. Gumerman (ed.), *Conservation Archaeology, A Guide for Cultural Resource Management Studies*. New York: AP.
- Manning, Edward W. and T. David Dougherty, 1995. *Sustainable Tourism: Preserving the Golden Goose*, *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 36 (2): 29-42
- Manthieson, A and Wall, 1989. *Tourism: Economic, Physical and Social Impacts*. London: Longman.
- McIntosh, R.W. 1995. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. NY: John Wiley & Sons.
- Meric, Hawva J. dan Judith Hunt, 1998. *Ecotourists' Motivation and Demographic Charac-teristic: A Case of North Carolina Travelers*. *Journal of Travel Research*, 36 (Spring).
- Mundardjito, 1995. *Pendekatan Integratif dan Partisipatif Dalam Pelestarian Budaya*. Jakarta: FS UI.



Daftar Pustaka

- _____. 1999. Isu Perencanaan Pengembangan SDM Kepariwisataan Menyongsong Perkembangan Baru Pariwisata Internasional, Makalah dalam *Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II*, Ditjen PUOD Depdagri dan PUSPAR UGM, Yogyakarta, 25 – 29 Oktober 1999.
- Nuryanti, Wiendu., 1997. Perencanaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Makalah dalam *Pendidikan dan Pelatihan Mengenai Dampak Lingkungan*, Departemen dan PUSPAR UGM, Yogyakarta: 4 – 21 Agustus 1997.
- _____. 1999. *Introduction Sustaining Heritage Through Cultural Industries*, dalam Wiendu Nuryanti (ed.), *Heritage, Tourism and Local Communities*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- Schiffer, Michael B. and George J. Gumerman (ed.), 1977. *Conservation Archaeology, A Guide for Cultural Resource Management Studies*. New York: Academic Press.
- Sirakaya, E and R.W. McLellan. 1998. *Modelling tour operators voluntary compliance with ecotourism principles: A behavioral approach*. *Journal of Travel Research*, 36 (Winter): 42-55.
- Soeroso, Amiluhur. 2000. Penilaian Ekonomi Untuk Pengembangan Ekowisata Kotagede, *Tesis* (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Sugandhy, Aca., 1998. *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Sumantri, Bambang, 1988. *Hari Depan Kita Bersama*. Jakarta: Gramedia.



- Sumarwoto, Jarot. 1997. Pengelolaan produk wisata alternatif: Kasus pengalaman praktis, dalam Myra P. Gunawan (ed.), *Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Supriana, Nana., 1997. Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam: Suatu Peluang Ekonomi, Peran Serta Masyarakat, dan Ramah Lingkungan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam, dalam Myra P. Gunawan (ed.), *Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Tanudirjo, D.A. 2004. **Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya**, disampaikan dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.
- 2007. **Sekilas Tentang Warisan Budaya. Modul untuk Workshop Manajemen Bencana** diselenggarakan oleh UNESCO dan Pusat Studi Bencana Alam UGM di Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1998. Industri Pariwisata: Suatu dilema paradigmatik. *Makalah Lokakarya Nasional Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata*. Yogyakarta: PUSPAR UGM.
- 1999. **Isi-Isu Strategis Pengembangan Pariwisata**, Makalah dalam *Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisata Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II*, Ditjen PUOD Depdagri dan PUSPAR UGM, Yogyakarta, 25 – 29 Oktober 1999.
- Wight, Pamela. 1993. *Ecotourism: Ethics or Eco-Sell?*. *Journal of Travel Research*, 31 (Winter): 3-9.

